

KONSEP PEMBANGUNAN TATA RUANG, INFRASTRUKTUR, SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN (SUATU STUDI WILAYAH PERKOTAAN)

Anhar Drakel

Institut Sains Dan Kependidikan (ISDIK) Kie Raha Ternate
Email: anharrakel29@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur perkotaan memiliki peran yang sangat signifikan terhadap keberhasilan pemanfaatan ruang perkotaan. Konsep dasar perencanaan pembangunan pada tata ruang harus berorientasi pada pemenuhan pelayanan infrastruktur perkotaan yang mampu mendukung terwujudnya pola perkembangan kota yang aman, tertib, lancar, asri dan sehat yang berorientasi konsep sumberdaya dan konsep lingkungan hidup. Konsep perencanaan pembangunan tata ruang wilayah, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan harus memenuhi unsur-unsur dalam konsep pembangunan, yaitu penataan tata ruang, penataan kawasan, penataan perkampungan kumuh, bangunan dan hunian liar, kebutuhan dan ketersediaan rumah layak huni, perumahan dan lingkungan permukiman, penataan dan penanganan banjir, kebersihan kota, penyediaan rumah layak huni orang miskin, infrastruktur pembangunan laut, darat dan udara, ruang terbuka hijau, pengendalian Air Bawah Tanah, pengendalian penambangan bahan Galian Golongan C, pengendalian pencemaran lingkungan, penegakkan hukum.

Kata Kunci: *perencanaan, tata ruang, sumberdaya alam dan lingkungan.*

ABSTRACT

Urban infrastructure development has a very significant role in the successful use of urban space. The basic concept of development planning in spatial planning must be oriented to the fulfillment of urban infrastructure services that are able to support the realization of a safe, orderly, smooth, beautiful and healthy urban development pattern that is oriented towards the concept of resources and the concept of the environment. The concept of regional spatial planning development planning, infrastructure, natural resources and the environment must meet the elements in the development concept, namely spatial planning, regional planning, structuring slums, illegal buildings and settlements, the need and availability of livable houses, housing and residential environments. , flood management and management, city cleanliness, provision of affordable housing for the poor, sea, land and air development infrastructure, green open space, underground water control, control of Group C mining of minerals, control of environmental pollution, law enforcement.

Keywords: *planning, spatial planning, natural resources and the environment.*

PENDAHULUAN

Optimalisasi pemanfaatan ruang kota sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan dan pembangunan kota mengalami perubahan paradigma, yaitu dari skala keseragaman menuju keberagaman, dari lahan sebagai sekedar wadah aktifitas menjadi bagian dari investasi dan pemberdayaan kandungan lokal. Perubahan paradigma ini memberikan konsekuensi logis bagi kota untuk mengembangkan diri

sesuai dengan potensi yang dikandungnya. Lebih dari itu, diperlukan pengembangan antar kawasan yang bertumpu pada keselarasan antar sinergisitas dengan wilayah sekitar. Dengan demikian diharapkan kebijakan tata ruang akan terhindar dari segala benturan kepentingan ego regional masing-masing wilayah pengembangan.

Kegiatan pembangunan infrastruktur perkotaan memiliki peran yang sangat signifikan terhadap keberhasilan pemanfaatan ruang. Berpijak pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate, konsep dasar pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan berorientasi pada pemenuhan pelayanan infrastruktur perkotaan yang mampu mendukung terwujudnya pola perkembangan kota pantai metropolitan yang aman, tertib, lancar, asri dan sehat. Implementasi konsep tersebut di atas memiliki banyak tantangan, hal ini disebabkan karena kondisi infrastruktur perkotaan yang terbangun telah mengalami penurunan kualitas dan fungsi yang cukup tajam, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Disisi lain, kelengkapan infrastruktur yang tersedia masih kurang dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan terlebih lagi bagi masyarakat kota metropolitan. Konsekuensi dari potret infrastruktur kota Ternate tersebut, mengandung dua dimensi kegiatan pembangunan. Dimensi pertama, adalah pelaksanaan pembangunan baru guna mengejar pemenuhan kebutuhan selaras dengan perkembangan masyarakat, sedang dimensi kedua adalah pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Pelaksanaan pembangunan kedua dimensi tersebut memerlukan biaya yang cukup besar. Untuk menjawab tantangan yang demikian maka diperlukan prioritas program yang proporsional sehingga dapat menciptakan infrastruktur yang berdaya dukung pada segala aktifitas perkotaan secara efektif dan efisien.

Disisi lain, sumber daya alam merupakan potensi yang dapat memacu percepatan pembangunan, sebab merupakan sumber daya yang sudah tersedia secara alami. Namun demikian, kuantitas sumber daya alam yang tersedia sangat berbeda satu dengan lainnya, di satu sisi ada yang berlimpah sedang yang lainnya relatif terbatas. Pada sumber daya alam yang relatif terbatas, perlu kajian yang lebih mendalam untuk pemanfaatannya, agar dalam pengembangan potensinya masih tetap dalam ambang batas terciptanya daya dukung lingkungan yang handal.

Potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah ternyata belum dimanfaatkan secara optimal, contoh sumber daya air, yang karena lemahnya pengelolaan sumber daya tersebut, belum memberikan nilai tambah pada masyarakat seperti untuk kebutuhan air bersih, tetapi justru menjadi masalah yang sangat merepotkan, yaitu dengan adanya bencana banjir dan rob. Terlepas dari keterbatasan dana dan kemampuan pengelolaan, sudah sepantasnya masalah sumber daya air yang berlimpah tersebut diubah sebagai potensi yang menjanjikan bagi perkembangan kota. Oleh karena itu, konsep pemanfaatan sumber daya air sebagai primadona pembangunan kota, mulai patut untuk dikedepankan pada era pembangunan kali ini.

Permasalahan utama bidang tata ruang, infrastruktur dan sumber daya alam dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurang konsistennya pengendalian pemanfaatan ruang
2. Kurang lengkapnya perencanaan tata ruang kawasan (RTRK)
3. Belum optimalnya penanganan perkampungan kumuh, bangunan dan hunian liar
4. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah layak huni
5. Belum meratanya penyebaran fasilitas perumahan dan lingkungan permukiman (fasum dan fasos)
6. Belum optimalnya penanganan banjir dan rob

7. Kurang optimalnya penanganan kebersihan kota
8. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar kelompok miskin;
9. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur serta sistem transportasi internal dan eksternal perkotaan
10. Belum memadainya prasarana transportasi udara, laut & darat yang mendukung fungsi kota metropolitan
11. Belum optimalnya pengelolaan dan estetika ruang publik
12. Kurangnya area hijau kota
13. Kurang optimalnya pengendalian Air Bawah Tanah
14. Lemahnya pengendalian penambangan bahan Galian Golongan C.
15. Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan
16. Lemahnya koordinasi pemanfaatan ruang;
17. Lemahnya penegakkan hukum

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tata Ruang & Penataan Ruang Menurut UU di Indonesia Dalam definisi secara umum, tata ruang adalah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat (struktur ruang), yang peruntukannya terbagi-bagi dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang). Tata ruang memiliki kaitan erat dengan kegiatan penataan ruang di setiap negara. Maka itu, pemerintah Indonesia pun mempunyai kebijakan penataan ruang. Kebijakan itu didasarkan pada undang-undang. Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, juga melandaskan kebijakan terkait pemanfaatan ruang dalam pembangunan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Contoh Wilayah Formal dan Fungsional di Indonesia serta Penjelasannya Struktur Keruangan Kota Menurut Teori Konsentris Hingga Sektoral Mengutip publikasi Kementerian ATR/BPN, rencana tata ruang di setiap negara disusun dengan tujuan yang sama: bagaimana memanfaatkan ruang yang terbatas supaya manusia bisa menjalankan aktivitasnya untuk memelihara kehidupan. Artinya, penataan ruang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan ruang. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengertian Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Menurut Gregory Mankiw (2003) dalam Teori Ilmu Ekonomi, infrastruktur artinya wujud modal publik (public capital) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Secara umum, arti infrastruktur seringkali dikaitkan struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum. Beberapa contoh infrastruktur dalam bentuk fisik antara lain jalan, jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan sebagainya. Selain itu, arti infrastruktur tak hanya soal fisik. Apa itu infrastruktur bisa berupa fasilitas non-fisik seperti pelayanan publik. Namun secara umum, infrastruktur terbagi dalam beberapa kelompok antara lain infrastuktur air, infrastuktur transportasi, infrastuktur energi, infrastuktur bangunan, infrastuktur pengelolaan limbah. Di Indonesia, pembangunan dan perawatan infrastruktur publik banyak dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia mulai memperoleh perhatian pada tahun 1970-an. Sejak saat itu konservasi sumber daya

alam di Indonesia mulai berkembang. Tujuan dilaksanakannya konservasi tersebut adalah untuk: 1. memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan; 2. menjamin keanekaragaman genetik; 3. pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem.

Sedangkan peranan kawasan konservasi dalam pembangunan meliputi:

1. Penyelamat usaha pembangunan dan hasil-hasil pembangunan;
2. Pengembangan ilmu pendidikan;
3. Pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa;
4. Pendukung pembangunan bidang pertanian;
5. Keseimbangan lingkungan alam; 6. manfaat bagi manusia.

Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nonhayati. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Strategi Konservasi Dunia kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi kegiatan:

1. Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan;
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan sudut pandang konsep studi ini proses perencanaan tata ruang wilayah membutuhkan suatu pendekatan perencanaan yang digunakan sebagai pengambil keputusan dalam penataan ruang wilayah. Adapun metode yang digunakan dalam pendekatan konsep ini adalah pengendalian pemanfaatan ruang, perencanaan tata ruang kawasan (RTRK), mengoptimalkan penanganan perkampungan kumuh, bangunan dan hunian liar, menyediakan rumah layak huni, mengoptimalkan fasilitas perumahan & lingkungan permukiman (fasum & fasos), mengoptimalkan penanganan banjir dan rob, mengoptimalkan penanganan kebersihan kota, mengoptimalkan pelayanan infrastruktur dasar kelompok miskin, mengoptimalkan pelayanan infrastruktur serta sistem transportasi internal dan eksternal perkotaan, menyediakan prasarana transportasi udara, laut dan darat yang mendukung fungsi kota metropolitan, mengoptimalkan pengelolaan dan estetika ruang publik, mengoptimalkan ruang terbuka hijau kota, mengoptimalkan pengendalian air bawah tanah, mengoptimalkan pengendalian penambangan bahan Galian Golongan C, mengoptimalkan pengendalian pencemaran lingkungan, mengoptimalkan koordinasi pemanfaatan ruang, mengoptimalkan penegakkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa konsep perencanaan tersebut dilakukan sehingga pengambilan keputusan dalam perencanaan harus tepat. Metode yang digunakan dalam konsep ini yaitu : Observasi lapangan, wawancara, studi literature. Adapun metode ini bertujuan untuk mencari solusi dalam pemasalahan perencanaan tata ruang wilayah.

ANALISIS PEMBANGUNAN TATA RUANG, INFRASTRUKTUR, SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN TATA RUANG

Arah Kebijakan

Kebijakan penataan ruang kota merupakan basis dari segala kebijakan pengembangan fisik kota, sebab hampir semua aspek pemanfaatan ruang kota harus berpijak pada tata ruang kota yang telah ditetapkan. Mengingat strategisnya aspek kebijakan ini bagi perkembangan fisik kota, maka diharapkan kebijakan ini seyogyanya mampu mengakomodasi semua potensi kota, baik secara internal maupun eksternal, sehingga arah pembangunan kota tidak meninggalkan elemen potensi dalam setiap tahap pembangunan. Berlandaskan kajian tata ruang kota tahun 1995 – 2005 maka pemanfaatan ruang kota dalam kebijakan tata ruang ini diarahkan :

1. Keselarasan pemanfaatan ruang yang mampu mengembangkan fungsi setiap kawasan;
2. Terciptanya hubungan sinergis antara wilayah kota dengan wilayah daerah sekitar;
3. Pengembangan sumber daya lokal dan berdaya dukung lingkungan yang berkesinambungan.

Tujuan dan Sasaran

Program ini bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang kota, sehingga mampu mewujudkan ruang kota yang dapat menampung segala aktifitas perkotaan namun tetap memperhatikan daya dukung lahan. Sedang sasaran program ini adalah mewujudkan pemanfaatan ruang yang harmonis, produktif, estetis, berkarakteristik dan berdaya dukung lingkungan.

Program Pembangunan

Penataan Ruang dan Kawasan

Bias antara rencana dan pemanfaatan tata ruang bukan hal yang harus dihindari. Sebab rencana tata ruang merupakan pola pendekatan dalam pemanfaatan tata ruang. Yang perlu digaris bawahi dari program ini adalah benang merah keterkaitan antara rencana dan pemanfaatan ruang kota, sehingga mampu mewujudkan konsistensi setiap aplikasi kebijakan pemanfaatan ruang dalam melaksanakan pengendalian tata ruang, yang obyektif, produktif dan berwawasan lingkungan. Guna mewujudkan program ini dilakukan melalui kegiatan penyusunan rencana tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan evaluasi rencana tata ruang kota.

Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

Dasar dari program ini adalah belum tersedianya data dan teknologi informasi tata ruang yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Sementara dalam era pelayanan pembangunan saat ini diperlukan sistem pengelolaan tata ruang yang transparan dan mampu mengantisipasi setiap kecenderungan perkembangan kota. Perwujudan program ini dilakukan melalui penyediaan informasi tataruang dalam berbagai media.

Penataan Pertanahan

Program ini untuk mengatur perpepetakan tanah yang belum terpola secara efisien dan efekyif, baik secara teknis maupun administratif. Hal ini akan sangat mendukung terwujudnya efisiensi pemanfaatan ruang dan meningkatkan produktifitas lahan perkotaan, serta menjamin kepastian hak kepemilikan tanah. Implementasi program ini dilaksanakan melalui kegiatan konsolidasi tanah, pelaksanaan catur tertib pertanahan dan pengembangan GIS (*Geografics Information System*).

Penataan Bangunan

Dasar dari program ini guna menjembatani kesenjangan antara rencana tata ruang dengan implementasi pemanfaatan ruang. Hal ini disebabkan oleh karena perencanaan tata ruang kota belum mampu sebagai arahan detail dalam pemanfaatan ruang. Untuk itu, setiap kawasan strategis kota sudah selayaknya dilengkapi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Perwujudan program ini melalui kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTRK, RTBL), pengendalian dan evaluasi bangunan.

Konservasi Lahan

Pemenuhan kawasan hijau diupayakan sebagai media penyalaras akan kecenderungan degradasi ketersediaan udara bersih dan sehat. Dengan tersedianya ruang terbuka hijau yang cukup diharapkan mampu menurunkan tingkat polusi udara kota, sekaligus sebagai media resapan air hujan yang pada akhirnya berfungsi sebagai media pencegah bahaya banjir. Implementasi program ini dilakukan melalui penyusunan rencana kawasan konservasi dan pengendalian atas implementasi peruntukan lahan serta konservasi lahan kritis.

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI

Arah Kebijakan

Sebagai kota besar yang memiliki visi kota metropolitan, sektor transportasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung fungsi kota. Untuk itu, transportasi sebagai media pergerakan barang dan jasa, harus mampu mencerminkan tingkat efisiensi dan efektifitas kota dalam hal mobilitas dan aksesibilitas kota, baik secara internal maupun eksternal.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah perkotaan. Muara dari arah kebijakan ini adalah terwujudnya perimbangan akan pertumbuhan yang harmonis antara pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan permukiman.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan program ini adalah terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi perkotaan secara kualitas dan kuantitas. Sedang sasaran program adalah meningkatnya mobilitas barang dan jasa guna mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan.

Program Pembangunan Rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan

Program ini dimaksudkan guna mengembalikan kualitas jalan yang mengalami penurunan fungsi sebagai akibat terjadinya kerusakan, sehingga jaringan jalan yang ada mampu tetap berperan menjadi media mobilitas perkotaan secara optimal. Wujud dari program ini dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan baik secara rutin maupun periodik

Peningkatan jalan dan jembatan

Perkembangan penduduk dan aktifitas kota menuntut pengembangan mobilitas antar wilayah, untuk itu diperlukan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan jalur-jalur strategis sebagai media perkembangan mobilitas perkotaan. Kegiatan dari program ini berupa pembangunan jalan dan jembatan baru maupun yang bersifat peningkatan jalan dan penggantian jembatan.

Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan dan simpul transportasi

Kepadatan lalu lintas jalan dalam wilayah perkotaan memerlukan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan jalan. Sebagai optimalisasi fungsi jalan diperlukan fasilitas lalu lintas, simpul- simpul transportasi secara memadai agar ketertiban, kelancaran dan keamanan para pengguna jalan dapat tercapai. Implementasi program ini dilakukan antara lain melalui pemeliharaan dan penyediaan rambu-rambu lalu lintas, pembangunan dan rehabilitasi terminal angkutan umum.

Pengembangan fasilitas transportasi darat, laut dan udara.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Pantai Metropolitan, perlu didukung pengembangan fasilitas yang memadai baik darat (kereta api), Laut dan Udara. Mengingat bahwa kewenangan penanganan masalah tersebut sampai saat ini masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat, maka program ini dimaksudkan untuk mendorong, memfasilitasi, serta melaksanakan kemitraan dalam pengembangan fasilitas transportasi. Perwujudan program ini melalui peningkatan prasarana transportasi kota, pembangunan prasarana transportasi darat, laut dan udara.

Pengembangan manajemen transportasi dan moda angkutan umum

Perkembangan kota menuntut adanya inovasi dan kreasi sistem transportasi sehingga pelayanan transportasi mampu menjangkau setiap aspek kebutuhan mobilitas perkotaan, baik secara internal maupun eksternal kota. Prioritas program ini diarahkan kepada penanganan moda angkutan umum yang sesuai perkembangan kota. Wujud program ini dilakukan dengan kegiatan penyusunan pola umum transportasi kota, penertiban angkutan umum, penetapan moda transportasi.

Peningkatan pelayanan fasilitas pedestrian.

Berkembangnya aktifitas kota yang cukup pesat berpengaruh pada meningkatnya arus lalu lintas yang pada akhirnya akan mengurangi keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki baik yang melintasi maupun yang berada di tepi jalan raya. Oleh karena itu program ini dimaksudkan untuk *menyediakan fasilitas pedestrian agar tercapai* rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki khususnya disekitar jalan raya. Salah satu implementasi program ini melalui kegiatan revitalisasi pedestrian area, peningkatan kesadaran masyarakat pengguna jalan operasi penertiban pedestrian.

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PRASARANA KOTA

Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan permukiman dan prasarana kota diarahkan untuk mendukung kota agar dapat berfungsi optimal sesuai peran dan beban yang diemban sebagai kota metropolitan yang berciri pantai. Lebih dari itu, esensi dari pembangunan ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kota yang pada muaranya diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sebagai warga kota pantai metropolitan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan program pembangunan permukiman dan prasarana kota adalah terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, estetis, nyaman dan layak huni. Sasarannya adalah mewujudkan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta terpenuhi kebutuhan fasilitas sosial yang memadai, seperti taman, jalan, sanitasi lingkungan, sarana ibadah dan lain-lain.

Program Pembangunan

Penyediaan dan Perbaikan Perumahan dan Permukiman

Pada dasarnya program penyediaan perumahan dan permukiman lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, prioritas program yang dilakukan oleh Pemkot diarahkan pada pemenuhan kebutuhan papan masyarakat kurang mampu, baik berupa lahan maupun perumahan yang layak huni dan terjangkau. Sedangkan maksud program perbaikan perumahan dan permukiman ini meliputi dua pendekatan kualitas perumahan serta sarana dan prasarananya. Representasi dari program ini berupa peremajaan perumahan dan permukiman kumuh maupun peningkatan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat miskin, penertiban rumah liar.

Penyehatan Lingkungan Permukiman

Infrastruktur perumahan dan permukiman yang ada di masyarakat dalam skala lingkungan, belum bisa dikelola secara penuh oleh masyarakat, oleh karena itu peran pemerintah masih dibutuhkan dalam memberikan stimulan penyediaan dan pemeliharannya, utamanya pada saluran pematusan, instalasi pengolah air limbah, septiktank komunal dan penyediaan fasilitas MCK umum. Kegiatan program ini meliputi penyehatan lingkungan permukiman dalam arti luas.

Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

Pelayanan air bersih pada prinsipnya dilakukan oleh PDAM, namun dalam realisasinya belum menjangkau seluruh wilayah kota. Hal ini mengakibatkan kebutuhan air bersih sebagian wilayah masih memerlukan perhatian dari unsur teknis pemerintah kota guna melengkapi keterbatasan jangkauan pelayanan oleh PDAM. Untuk itu program ini dimaksudkan membantu penyediaan infrastruktur air bersih, bagi masyarakat. Wujud kegiatan program ini adalah penyediaan air bersih dengan menggali potensi sumber-sumber air yang ada disekitar kawasan pelayanan.

Kebersihan Kota

Aspek kebersihan sebagai salah satu indikator kesehatan lingkungan kota, diperlukan pengelolaan yang terpadu dan simultan. Keterbatasan perangkat kebersihan masih menjadi kendala pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan terobosan pengelolaan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Salah satu obsesi pemerintah kota dalam hal kebersihan adalah mengembangkan budaya hidup bersih dan sehat. Perwujudan program ini melalui kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan, peningkatan peran dunia usaha & partisipasi masyarakat dalam kebersihan, penyediaan TPS dan TPA yang efektif dan efisien.

Penataan pusat niaga dan pedagang kaki lima

Fenomena kehadiran PKL sering kali dihadapkan pada benturan berbagai aspek kepentingan. Untuk itu diperlukan keberpihakan secara proporsional terhadap PKL tanpa mengorbankan aspek lain termasuk didalamnya unsur ketertiban dan estetika kota. Patut dikedepankan dari eksistensi PKL adalah bagaimana mewadahi PKL dalam ruang yang memenuhi aspek tata ruang, produktivitas, estetis dan manusiawi. Disamping itu, pusat – pusat niaga yang tersebar diberbagai kawasan masih perlu untuk dibenahi dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Representasi program ini melalui kegiatan penataan PKL, revitalisasi pusat-pusat niaga tradisional.

Revitalisasi kawasan warisan budaya

Banyak peninggalan sejarah yang ada di Kota Semarang baik berupa warisan budaya bangunan maupun prasarana lainnya yang saat ini masih belum optimal dalam pelestarian, pengelolaan maupun pemanfaatannya. Oleh karena itu program ini dimaksudkan untuk melestarikan, mempertahankan serta mengoptimalkan pemanfaatannya agar memberikan nilai tambah yang lebih baik. Kegiatan program ini dilakukan melalui penataan kawasan budaya dan religi, penataan kawasan pariwisata.

Penghijauan, Pertamanan dan Perabot Jalan.

Dalam mewujudkan visi kota pantai metropolitan, daya dukung lahan kota perlu dipertahankan agar dapat memberikan kenyamanan dan mampu menampung segala aktifitas masyarakat kota. Untuk mempertahankan daya dukung lahan kota , maka penghijauan ruang terbuka perlu dikembangkan dan optimalkan untuk meningkatkan resapan air kawasan kota dan pendukung penurunan tingkat polusi udara.

Ketersediaan ruang publik telah berkurang akibat dari alih fungsi sebagian ruang publik yang ada. Untuk itu, program ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara ruang publik yang ada serta memperbanyak ruang publik pada kawasan-kawasan berkembang. Disisi lain, elemen dekorasi kota sebagai kosmetik wajah kota masih diperlukan inovasi dan kreasi, sehingga mampu mewujudkan estetika kota yang dinamis, produktif dan mampu berfungsi sebagai paru-paru kota. Kegiatan program ini meliputi penghijauan kota, pemeliharaan taman kota, penataan dekorasi kota dan pengembangan ruang publik.

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Arah Kebijakan

Konsentrasi pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada pengelolaan sumber daya air dan sumber daya lahan yang berkelanjutan. Pijakan dasarnya adalah tetap mempertimbangan aspek ketahanan daya dukung lingkungan dalam rangka mengemban terjaminnya pembangunan yang berkesinambungan. Disamping itu, pengelolaan sumber daya air dan lahan di beberapa bagian diarahkan untuk menjaga fungsi kelestarian lahan dan ketersediaan air.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan program ini adalah pemanfaatan sumber daya air dan lahan yang dapat memberikan manfaat dengan tetap memperhitungkan daya dukung lahan. Sedang sasarannya adalah pengelolaan sumber air, konservasi dan rehabilitasi lahan, pencegahan dan pengurangan dampak polusi guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Program Pembangunan

Penataan dan normalisasi Sungai, Drainase dan Sumber Air

Program ini diutamakan untuk memperlancar arus air sungai melalui pemeliharaan badan–badan penataan sungai dan pemanfaatan, pelestarian DAS baik bagian hulu maupun hilir, memelihara drainase kota dan pengelolaan sumber-sumber air . program ini dimaksudkan untuk pencegahan bahaya banjir dan rob yang sering terjadi. Representasi program ini melalui kegiatan normalisasi sungai dan drainasi, penataan bantaran, pembangunan saluran drainase kota serta meningkatkan kerjasama baik dengan dunia usaha maupun dengan daerah lain.

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Program ini ditujukan untuk mengelola dan mempertahankan fungsi pelayanan air bagi persawahan dan pertambakan sekaligus berfungsi sebagai media drainase dan irigasi. Area lahan persawahan irigasi yang diairi seluas kurang lebih 4.360 Ha (11,3 % dari luas kota). Kegiatan program ini meliputi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, perbaikan bendung irigasi & pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Pengendalian eksploitasi Air Bawah Tanah

Pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai kegiatan usaha menjadi sangat penting, sebab pemenuhan kebutuhan Air Bersih dari pengelolaan air permukaan belum mencukupi. Program ini untuk mengendalikan pemanfaatan air bawah tanah, sehingga sesuai dengan sumber daya air dan daya dukung lingkungan yang tersedia. Representasi program ini meliputi pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ABT, utamanya oleh dunia usaha dan industri serta peningkatan kerjasama regional.

Penanganan dan pengendalian dampak lingkungan

Program ini dimaksudkan untuk menangani dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan industri/ usaha, perkotaan, melalui kegiatan Program kali Bersih (prokasih), langit biru, pelaksanaan Amdal dan UKL /UPL serta pengembangan dan penegakan Hukum Lingkungan.

Pengembangan Sumber Daya Air

Sumber daya air yang tersedia, belum dimanfaatkan secara optimal, untuk itu masih perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi yang tersedia. Program ini dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya air secara lestari dan berkesinambungan. Kegiatan program ini meliputi pengkajian system drainasi, penyusunan *detail plan drainage*, serta penerapan konsep *Semarang water front city*.

Pengendalian Banjir dan Rob

Banjir dan rob merupakan permasalahan laten bagi kota Semarang. Berbagai bentuk penanganan telah dilakukan namun belum dapat teratasi secara tuntas. Untuk itu, diperlukan terobosan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait. Esensi penanganan ke depan dilakukan dengan pendekatan lingkungan menyeluruh (*holistic*). Implementasi program ini melalui pelaksanaan pemeliharaan dan pembangunan drainasi, pompanisasi, pembangunan polder dan kolam penampungan yang melibatkan peran aktif masyarakat.

Pengendalian pertambangan rakyat

Eksploitasi Bahan Galian Golongan C memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan infrastruktur perkotaan. Bahkan menjadi peluang kegiatan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Namun kecenderungan yang ada, nampaknya kegiatan ini belum dilakukan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bermuara pada rusaknya lingkungan dan membahayakan masyarakat. Untuk itu perlu diberlakukan aturan yang ketat, tindakan tegas bagi pelanggarnya sesuai dengan kewenangan yang ada. Kegiatan program ini melalui pendataan lokasi tambang, peningkatan kesadaran penambang & pengendalian atas aktifitas penambangan rakyat diberbagai lokasi.

KESIMPULAN

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dalam pembangunan tata ruang wilayah harus diangkat sesuai dengan permasalahan yang terjadi secara realitas, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan sudah bisa menjawab permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- T, Ahmad dan Rahmansyah, 1996, Konsep Agro Marina dalam Pembangunan Perikanan Pantai. Dipresentasikan dalam Rapat Kerja Teknis “Arah dan Kebijakan Pembangunan Perikanan Pantai Berwawasan Lingkungan, Ujung Pandang, 17-18 April 1996, Balai Penelitian Perikanan Pantai Maros.
- Bappeda NTB, 2001, Pokok-Pokok Arah Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Pulau Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-NTB.
- DKP, 2004, Visi dan Misi Departemen Kelautan dan Perikanan, <http://www.dkp.go.id>
- R, Dahuri; Rais, J; Ginting, S.P; dan Sitepu, MJ, 1996, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, PT Prandya Paramita, Jakarta.

- R, Hilaliyah, 2004, Arah Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Dompu. Tidak dipublikasikan
- Nikijuluw, V.P.H, 2002, Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Kerjasama Pusat Pemberdayaan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT. Pustaka Cidesindo.
- Prisdimmingo; Nazam, M; Wahid, A. S; Sisca, S; dan Sudjudi, 1998, Uji Adaptasi Waktu Tanam terhadap Produktivitas Rumput Laut (*Eucheuma cottoni*) di Teluk Ekas Dusun Batunampar, Lombok Timur. Prosiding Seminar Penyuluh, Peneliti dan Petugas Terkait Propinsi Nusa Tenggara Barat, Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Mataram, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Radiarta, I.N; Saputra, A; dan Priono B, 2004. Pemetaan Kelayakan Lahan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Laut di Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat. Jurnal Perikanan Budidaya 2004.
- N, Samodra, 2000. Penataan Pemanfaatan Ruang Budidaya Laut di Perairan Pulau Lombok, Makalah disampaikan pada Seminar Evaluasi Penataan Pemanfaatan Lahan Budidaya Laut di Perairan Nusa Tenggara Barat, 8 November 2000 di Mataram.
- Sugandi, A, 1996. Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan di Indonesia. Bahan Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Lembaga Penelitian IPB dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Depdagri RI dan Bank Pembangunan Asia.
- Prisdimmingo, Surahman A,. 2002. Pengembangan Desa Pantai Berbasis Budidaya Laut. Prosiding Seminar Nasional “Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Pemanfaatan Sumber daya Pertanian dan Penerapan Technology Tepat Guna, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Mataram, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 211-215 p.
- Mengurangi Kemiskinan melalui Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan Berbasis Kerakyatan Kasus Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat
- Mashur, Surahman A, Prisdimmingo. 2002. Respon dan Persepsi Nelayan terhadap Introduksi Teknologi Budidaya Ikan Kerapu dan Lobster dalam KJA di Desa Batunampar, Kabupaten Lotim. Prosiding Seminar Nasional “Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Pertanian dan Penerapan Technology Tepat Guna, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Mataram, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 186-191 p.
- Susilo, 2004, Raksasa Ekonomi yang Masih Tidur, Buletin Prospek Dompu edisi II, September, 2004 5-6p.
- Syaiful, M; Azhar, L.M; Razak, A; Wahidin; dan Arif, 2001. Penelitian Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu, Kerja sama Bappeda dan Dinas Perikanan dan Kelautan, 40 pp.
- Wahid, A; Kariawan H; 2004, Mengisi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan, Tinjauan Sejarah dan Perspektif Ekonomi. Teplok Press. Jakarta, 128 pp.